



Dampak Kemiskinan terhadap Kualitas Pendidikan Anak di Indonesia: Rekomendasi Kebijakan yang Efektif

The Impact of Poverty on the Quality of Children's Education in Indonesia: Effective Policy Recommendations

Eki Darma Putra

Bapperida Kabupaten Kotawaringin Timur

Email: ekidarma0531@gmail.com

Article Info

Article history:

Received : 19-03-2026

Revised : 21-03-2026

Accepted : 23-03-2026

Published : 25-03-2026

Abstract

The issue of poverty in Indonesia has become a major focus in the national development process. Poverty is not only an economic issue but also affects various aspects of life, including children's education. Article 33 of the 1945 Constitution emphasizes that poverty is a serious problem related to many factors such as education, income, unemployment, geography, character, and culture. Poverty is not limited to rural areas but also occurs in urban areas. This problem has existed since before the Indonesian reform era and is a complex challenge faced by all governments worldwide, including Indonesia.

Keywords: Poverty, Children's Education, and Economics

Abstrak

Isu Masalah kemiskinan di Indonesia telah menjadi fokus utama dalam proses pembangunan nasional. Kemiskinan tidak hanya menjadi masalah ekonomi, tetapi juga mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan anak. Pasal 33 dari Undang-Undang Dasar 1945 menekankan bahwa kemiskinan merupakan masalah serius yang terkait dengan banyak faktor seperti pendidikan, pendapatan, pengangguran, geografis, karakter, dan budaya. Kemiskinan tidak hanya terbatas pada daerah pedesaan, tetapi juga terjadi di perkotaan. Masalah ini telah ada sejak sebelum era reformasi Indonesia dan merupakan tantangan kompleks yang dihadapi oleh semua pemerintahan di dunia, termasuk Indonesia.

Kata kunci : Kemiskinan, Pendidikan Anak dan Ekonomi

PENDAHULUAN

Isu Masalah kemiskinan di Indonesia telah menjadi fokus utama dalam proses pembangunan nasional. Kemiskinan tidak hanya menjadi masalah ekonomi, tetapi juga mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan anak. Pasal 33 dari Undang-Undang Dasar 1945 menekankan bahwa kemiskinan merupakan masalah serius yang terkait dengan banyak faktor seperti pendidikan, pendapatan, pengangguran, geografis, karakter, dan budaya. Kemiskinan tidak hanya terbatas pada daerah pedesaan, tetapi juga terjadi di perkotaan. Masalah ini telah ada sejak sebelum era reformasi Indonesia dan merupakan tantangan kompleks yang dihadapi oleh semua pemerintahan di dunia, termasuk Indonesia.

Dalam konteks pendidikan, Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) menjadi landasan hukum yang penting. Menurut undang-undang ini, pendidikan adalah usaha yang disengaja untuk menciptakan suatu lingkungan di mana peserta didik dapat secara aktif memanfaatkan proses belajar untuk mewujudkan potensinya. Pendidikan diharapkan dapat membantu siswa berkembang menjadi individu yang cerdas, bermoral



tinggi, dan memiliki keterampilan yang bermanfaat bagi individu dan masyarakat.

Yang menjadi masalah terkait kemiskinan adalah sebagai berikut :

1. Keterbatasan modal (Ragnar Nurkse)
2. Rendahnya tingkat pendidikan (SISDIKNAS)
3. Kesempatan yang terbatas dalam berpartisipasi dalam pembangunan (Leviton (1980) dalam Papilaya, J. (2020)

Masalah	Urgency	Seriusness	Growth	Skor Total
1. Keterbatasan modal	4	4	5	13
2. Rendahnya tingkat pendidikan	5	5	5	15
3. Kesempatan yang terbatas dalam berpartisipasi dalam pembangunan	3	4	5	12

Berdasarkan hasil USG di atas, maka yang menjadi masalah utama adalah masalah nomor 2.

Penyebab masalah level 1:

1. Rendahnya akses Modal
2. Pengangguran
3. Akses Modal

Penyebab masalah level 2:

1. Keterbatasan Partisipasi dalam pembangunan
2. Faktor Umur
3. Pendapatan Rendah
4. Kurang Bekerja
5. Memenuhi kebutuhan pokok minimum
6. Kelemahan dan pilihan
7. Hasil dari keadaan yang tidak dapat dihindari
8. Kesempatan yang tidak merata dalam masyarakat
9. Masalah multidimensional yang terkait dengan aspek sosial, politik

Sehingga akar masalahnya adalah:

1. Rendahnya tingkat pendidikan
2. Rendahnya Akses Modal
3. Keterbatasan Partisipasi dalam pembangunan

Berdasarkan akar masalah tersebut, maka problem statement yang di-highlight adalah rendahnya tingkat pendidikan dikarenakan rendahnya akses Modal dan keterbatasan Partisipasi dalam pembangunan.

METODE

Metodologi yang digunakan dalam artikel ini adalah studi literatur kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Penelitian dimulai dengan pengumpulan data dari berbagai sumber



yang relevan tentang masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kemiskinan, sebagai satu permasalahan yang serius, telah menjadi sorotan dalam konteks pembangunan, meskipun pemerintah telah menerapkan sejumlah upaya dengan memperkenalkan paket dan program yang melibatkan para ahli dalam mengatasi masalah ini. Namun, penanganan kemiskinan terus menjadi tantangan yang sulit diatasi secara tuntas. Kemiskinan didefinisikan sebagai kondisi di mana sejumlah penduduk tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok minimum, sehingga mereka terdampar di bawah standar kebutuhan tersebut. Penentuan kemiskinan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pun mengacu pada pendekatan kebutuhan dasar. Berbagai teori, seperti teori Neo Liberal dan teori Marjinal, memberikan pemahaman tentang penyebab kemiskinan, mulai dari faktor individu seperti kelemahan dan pilihan, hingga budaya kemiskinan yang meliputi sikap pasif, kurangnya usaha, dan rendahnya ambisi untuk memperbaiki masa depan.

Kemiskinan juga ditandai dengan keterbatasan modal, rendahnya tingkat pendidikan, serta kesempatan yang terbatas dalam berpartisipasi dalam pembangunan. Sejumlah definisi oleh lembaga dan ahli, seperti BAPPENAS, Levitan (1980) dalam Papilaya, J. (2020), serta Faturchman dan Marcelinus Molo (1994) dalam Papilaya, J. (2020), menegaskan bahwa kemiskinan bukanlah sesuatu yang dikehendaki oleh individu miskin, melainkan lebih sebagai hasil dari keadaan yang tidak dapat dihindari dengan sumber daya yang dimilikinya. Dengan demikian, kemiskinan bukan hanya masalah ekonomi semata, namun juga merupakan masalah multidimensional yang terkait dengan aspek sosial, politik, dan kesempatan yang tidak merata dalam masyarakat. Kemiskinan menjadi cerminan dari interaksi kompleks antara individu dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, yang menuntut pendekatan yang komprehensif dan terpadu dalam penanganannya.

Kemiskinan akibat keterbatasan modal merupakan siklus lingkaran setan di mana pendapatan rendah menghambat tabungan, sehingga membatasi modal untuk usaha atau pendidikan, yang berujung pada produktivitas rendah. Data menunjukkan, keterbatasan akses sumber daya/modal berkontribusi signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia. Berikut adalah data dan poin penting terkait kemiskinan akibat keterbatasan modal:

1. Pengangguran & Kurang Bekerja (Ragnar Nurkse): Kurangnya modal membatasi kemampuan masyarakat untuk berinvestasi dalam produktivitas, yang mengakibatkan pendapatan tetap rendah.
2. Akses Modal & Sumber Daya: Rendahnya akses terhadap modal usaha, baik secara kuantitas maupun kualitas, menjadi salah satu penyebab utama kemiskinan.
3. Data Kemiskinan (BPS 2025): Jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 23,36 juta orang (8,25 persen) per September 2025.
4. Alternatif Data (Sigmaphi 2023): Sekitar 42,9 persen penduduk (118,73 juta jiwa) hidup tidak layak berdasarkan pendekatan hak dasar (pangan/perumahan), menunjukkan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi daripada data BPS.
5. Modal Insani: Terbatasnya modal manusia (pendidikan/keterampilan) juga menjadi masalah serius yang memicu kemiskinan, terutama di pedesaan.



Data kemiskinan per Maret 2025 menunjukkan jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai sekitar 23,14 juta jiwa atau 8,8% dari total populasi, di mana keterbatasan partisipasi pembangunan dipicu oleh rendahnya pendidikan, pengangguran, serta akses terbatas ke sumber daya. Kemiskinan ini mencakup ketimpangan akses produksi, ketidaksetaraan, dan minimnya partisipasi.

1. Penyebab Utama Kemiskinan (Keterbatasan Partisipasi):

- Rendahnya Pendidikan: Rata-rata lama sekolah penduduk di atas 15 tahun masih rendah, membatasi partisipasi dalam pembangunan.

2. Pengangguran & Kurang Bekerja: Sulitnya mendapat pekerjaan dan hilangnya mata pencaharian menjadi penyebab dominan.

- Ketimpangan Akses: Minimnya akses ke sumber daya, modal, dan infrastruktur ekonomi.

3. Faktor Umur & Pendapatan Rendah: Penghasilan yang tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar.

4. Data Pendukung:

- Angka Kemiskinan: 23,14 juta jiwa (8,8%) pada Maret 2025.
- Sebaran (Data 2023): Penduduk miskin perdesaan lebih tinggi (14,16 juta orang) dibandingkan perkotaan (11,74 juta orang).
- Garis Kemiskinan (2023): Rata-rata Rp550.458 per kapita per bulan.

5. Dampak: Keterbatasan ini menyebabkan struktur masyarakat tidak seimbang, ketimpangan ekonomi, dan lambatnya pembangunan.

Data kemiskinan per Maret 2025 menunjukkan jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai sekitar 23,14 juta jiwa atau 8,8% dari total populasi, di mana keterbatasan partisipasi pembangunan dipicu oleh rendahnya pendidikan, pengangguran, serta akses terbatas ke sumber daya. Kemiskinan ini mencakup ketimpangan akses produksi, ketidaksetaraan, dan minimnya partisipasi. Penyebab Utama Kemiskinan (Keterbatasan Partisipasi):

1. Rendahnya Pendidikan: Rata-rata lama sekolah penduduk di atas 15 tahun masih rendah, membatasi partisipasi dalam pembangunan.

2. Pengangguran dan Kurang Bekerja: Sulitnya mendapat pekerjaan dan hilangnya mata pencaharian menjadi penyebab dominan.

3. Ketimpangan Akses: Minimnya akses ke sumber daya, modal, dan infrastruktur ekonomi.

4. Faktor Umur & Pendapatan Rendah: Penghasilan yang tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar.

Masalah serius dalam proses pembangunan adalah kemiskinan, sebuah permasalahan yang telah menjadi fokus utama pemerintah. Meskipun telah diperkenalkan berbagai paket dan program yang melibatkan para ahli kemiskinan, penyelesaian tantangan ini tetap menantang. Kemiskinan diartikan sebagai keadaan di mana sejumlah penduduk tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar minimal dan hidup di bawah standar tersebut. Badan Pusat Statistik (BPS)



mengukur kemiskinan dengan mempertimbangkan aspek-aspek kebutuhan esensial. BPS menegaskan bahwa kemiskinan menandakan ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar yang esensial untuk hidup yang layak, baik dalam bentuk bahan pangan maupun non-pangan.

Kemiskinan juga dapat diinterpretasikan sebagai situasi di mana seseorang tidak memiliki kemampuan untuk mengubah keadaan ekonomi dan sosialnya, yang tercermin dalam rendahnya produktivitas, kemauan untuk maju yang lemah, dan terbatasnya modal, pendidikan, serta kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Pendidikan merupakan jalan menuju kemajuan dan pencapaian kesejahteraan sosial dan ekonomi (Hardana, A. 2023). Kemiskinan, dalam beragam definisinya, menggambarkan kondisi ketidakmampuan individu atau keluarga untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Ini mencakup aspek-aspek seperti aset, sumber keuangan, organisasi sosial-politik, jaringan sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Kemiskinan bisa dilihat sebagai suatu kondisi yang kompleks, bukan sekadar hasil akhir tetapi juga sebagai proses interaksi individu dengan lingkungannya dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya.

Penyebab kemiskinan dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori utama: kemiskinan alamiah dan kemiskinan buatan. Kemiskinan alamiah muncul sebagai akibat dari sumber daya yang langka dan perkembangan teknologi yang rendah. Sementara itu, kemiskinan buatan terjadi karena struktur sosial yang tidak merata, sehingga anggota masyarakat tidak memiliki akses yang setara terhadap sarana ekonomi dan fasilitas-fasilitas. Selain itu, kemiskinan juga bisa disebabkan oleh perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia. Dalam realitasnya, individu-individu yang terjebak dalam kondisi kurang menguntungkan, seperti memiliki keterbatasan sumber daya, kinerja yang rendah, pendapatan yang minim, tabungan yang terbatas, dan investasi yang kurang optimal, merupakan kelompok yang mengalami kemiskinan (Nasution & Marliyah, 2023).

Rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan kemiskinan, yang secara langsung dipengaruhi oleh rendahnya kualitas pendidikan. Penelitian yang dilakukan oleh Chang dan Shi pada tahun 2016, seperti yang dikutip oleh Akhmad pada tahun 2021, menunjukkan bahwa investasi dalam Sumber Daya Manusia dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan inovasi dan penerapan teknologi. Dengan meningkatnya modal SDM, produktivitas tenaga kerja dapat ditingkatkan, yang pada akhirnya akan mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

Hasil penelitian oleh Suliswanto (2010) dalam Akhmad, K. A. (2021) juga menegaskan bahwa peningkatan kualitas SDM dapat berkontribusi pada pengurangan tingkat kemiskinan. Pembentukan modal manusia menjadi aspek krusial dalam pembangunan ekonomi dan politik suatu negara. Proses ini melibatkan upaya untuk meningkatkan jumlah individu yang memiliki keterampilan, pendidikan, dan pengalaman yang relevan untuk mendukung pertumbuhan dan kemajuan suatu masyarakat. Pendidikan merupakan salah satu faktor kunci dalam meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), yang pada gilirannya memberikan peluang yang lebih luas dan lebih baik untuk memperoleh pekerjaan yang layak dengan upah yang memadai (Asnawi, Kindangen, & Engka, 2021). Menurut Fadilla, A. (2017) berbagai hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pendidikan dasar memberikan kontribusi yang paling tinggi diantara semua jenis investasi dan bahkan lebih besar dari pada tingkat pengembalian yang dihasilkan dari kebanyakan proyek infrastruktur publik. Demikian, pemahaman dan peningkatan kualitas SDM



menjadi kunci dalam mengatasi kemiskinan dan mencapai pembangunan yang berkelas.

Kemiskinan, menurut Papilaya, J. (2020), dapat diidentifikasi melalui sejumlah indikator yang mencerminkan berbagai aspek kehidupan. Pendapatan per kapita merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah. Kenaikan pendapatan per kapita dapat meningkatkan daya beli dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, serta memiliki dampak signifikan dalam mengurangi jumlah penduduk yang hidup dalam kemiskinan (Purnomo, Istiqomah, & Suharno, 2020). Selain itu, ketika masyarakat atau keluarga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya yang meliputi pangan, sandang, dan papan. Kurangnya akses terhadap layanan penting seperti air bersih, kondisi sanitasi, pendidikan, layanan kesehatan, dan transportasi adalah tanda lainnya. Kemiskinan juga bermanifestasi sebagai ketidakmampuan merencanakan masa depan, yang dapat disebabkan oleh kurangnya komitmen terhadap keluarga dan pendidikan. Kerentanan terhadap berbagai risiko, baik risiko pribadi maupun sosial, serta kualitas sumber daya manusia yang rendah dan sumber daya alam yang terbatas merupakan ciri-ciri kemiskinan lainnya.

Teori terkait dengan kemiskinan antara lain konsep multidimensional yang mencakup tidak hanya kekurangan materi, tetapi juga kelemahan fisik, kerentanan, keterasingan, dan ketidakberdayaan (Chambler, 1984). Teori yang lain Menyebutkan bahwa kemiskinan disebabkan oleh rendahnya modal manusia (pendidikan, pelatihan) dan modal fisik, ditambah dengan adanya diskriminasi yang membatasi kesempatan kerja. (Dowling dan Valenzula, 2010) dan teori lainnya lagi bahwa menunjukkan pengaruh tingkat pengangguran yang tinggi terhadap tingkat kemiskinan, terutama bagi mereka yang tidak memiliki pekerjaan tetap atau usaha sampingan (Saragih, 2022).

Masih menjadi tantangan bagi Indonesia adalah kemiskinan, yang belum sepenuhnya teratasi sebagaimana yang diharapkan oleh pemerintah, sebagaimana terbukti dari angka persentase penduduk miskin yang masih di atas target yang ditetapkan. Pemerintah menetapkan target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020–2024 untuk proporsi penduduk miskin berkisar antara 7,5% hingga 6,5%. Meski demikian, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), proporsi penduduk yang hidup dalam kemiskinan tetap berada pada angka 9% antara tahun 2020 hingga 2022. Lebih lanjut, data BPS pada tahun 2023 menunjukkan bahwa Indonesia mengalami penurunan proporsi penduduk yang hidup dalam kemiskinan. kemungkinan akan mengalami stagnasi.

Temuan analisis deskriptif menunjukkan bahwa terjadi penurunan proporsi penduduk miskin di setiap provinsi di Indonesia. Bagi mereka yang berusia di atas 15 tahun, masa sekolah adalah delapan hingga sembilan tahun, dan lebih dari separuh penduduk di setiap provinsi siap memasuki dunia kerja. Berdasarkan analisis inferensial, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK), rata-rata lama pendidikan penduduk berusia di atas 15 tahun, dan produk domestik bruto (PDRB) per kapita semuanya menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia. Selain itu, rata-rata lamanya orang dewasa berusia di atas 15 tahun menyelesaikan pendidikan mempunyai dampak yang lebih besar terhadap penurunan kemiskinan dibandingkan TPAK atau PDB per kapita.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) secara konsisten menunjukkan pola bahwa mayoritas penduduk miskin memiliki tingkat pendidikan rendah. Per September 2025, angka kemiskinan nasional tercatat sebesar 8,25% (sekitar 23,36 juta orang). Pada Maret 2025, rata-rata garis kemiskinan nasional tercatat sebesar Rp. 609.160 per kapita per bulan. Artinya, rumah tangga



miskin dengan rata-rata 4,72 anggota rumah tangga yang pengeluarannya berada di bawah Rp. 2.875.235 per bulan. Garis kemiskinan dihitung berdasarkan pengeluaran kebutuhan dasar rumah tangga, baik makanan maupun non-makanan. Tingkat kemiskinan di perdesaan adalah 11,03 persen, dan perkotaan sebesar 6,73 persen. Tingkat kemiskinan di perdesaan mengalami penurunan, sementara di perkotaan mengalami kenaikan. Dibandingkan September 2024, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Maret 2025 meningkat di perkotaan dan menurun di perdesaan. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin melebar di perkotaan, tetapi menyempit di perdesaan. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) pada periode per Maret 2025 yang sama juga mengalami peningkatan di perkotaan dan penurunan di perdesaan. Artinya, ketimpangan distribusi pengeluaran di antara penduduk miskin di perkotaan meningkat, sementara di perdesaan menurun. Secara spasial, pada Maret 2025, terdapat 18 provinsi dengan tingkat kemiskinan di bawah angka kemiskinan nasional, sementara 20 provinsi memiliki tingkat kemiskinan di atas angka nasional. Tingkat kemiskinan tertinggi tercatat di Papua Pegunungan, sebesar 30,03 persen, sedangkan tingkat kemiskinan terendah terdapat di Bali, yaitu sebesar 3,72 persen.

Pilihan Kebijakan

Pilihan Kebijakan Pemerintah yakni Program Keluarga Harapan (PKH), Raskin, dan Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kemiskinan dan rendahnya kualitas pendidikan merupakan dua permasalahan serius dalam pembangunan. Kemiskinan, sebagai akar permasalahan, sering kali menjadi hambatan utama bagi individu-individu dalam memperoleh akses pendidikan yang berkualitas. Hindun, Soejoto, dan Hariyati (2019) menegaskan bahwa peningkatan tingkat pendidikan secara langsung berkorelasi dengan peningkatan tingkat penghasilan individu. Menurut Andi Agustang, dkk dalam Larasati, M. (2022), rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain efektivitas, efisiensi, dan standarisasi pendidikan yang rendah. Hal ini tercermin dalam kurangnya tujuan pembelajaran yang jelas, fokus pada standar hasil tanpa memperhatikan proses, serta orientasi pada pencapaian standar pendidikan saja tanpa memperhatikan efektivitas dan kegunaan pendidikan yang diperoleh. Selain itu, rendahnya kualitas sarana fisik, seperti gedung sekolah yang rusak, fasilitas pembelajaran yang tidak memadai, dan kualitas guru yang kurang memadai juga turut menyumbang terhadap rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia.

Kondisi sarana fisik pendidikan yang kurang memadai, seperti gedung sekolah yang rusak dan fasilitas pembelajaran yang tidak standar, menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi kualitas pendidikan di Indonesia. Hal ini membuat proses pembelajaran menjadi tidak efektif dan tidak efisien. Selain itu, rendahnya kualitas guru juga menjadi masalah serius. Banyak guru yang belum memiliki tingkat profesionalisme yang memadai dalam menjalankan tugas mengajar. Kesejahteraan guru juga menjadi perhatian penting, karena rendahnya kesejahteraan dapat berdampak negatif pada kualitas pengajaran yang diberikan.

Selain faktor internal, kurangnya pemerataan kesempatan pendidikan juga menjadi masalah serius. Di Indonesia, masih terdapat kesenjangan akses pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta antara masyarakat kaya dan miskin. Hal ini disebabkan oleh biaya pendidikan yang mahal, terutama bagi masyarakat menengah ke bawah. Akibatnya, banyak individu yang terpaksa menghentikan pendidikan mereka atau memilih untuk tidak melanjutkan pendidikan demi



menghindari beban biaya yang berat. Menurut Sinaga et al. (2023) Tingkat pendidikan yang rendah mengakibatkan rendahnya keterampilan dan kemampuan masyarakat.

Selain itu, kehadiran komunitas imigran yang melakukan urbanisasi tanpa memiliki cukup uang juga mempengaruhi tingkat kemiskinan. Karena kurangnya pendidikan dan pengalaman, komunitas migran ini sering kali kesulitan mendapatkan pekerjaan yang layak di wilayah metropolitan. Akibatnya, pendapatan mereka relatif rendah dan tidak mampu menutupi pengeluaran pokok mereka.

Kemiskinan dan rendahnya kualitas pendidikan merupakan dua masalah serius yang saling terkait dalam konteks pembangunan nasional Indonesia. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan upaya yang terkoordinasi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait. Pemerintah perlu meningkatkan investasi dalam bidang pendidikan, baik dalam hal infrastruktur maupun kualitas sumber daya manusia, seperti guru dan tenaga pendidik. Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan pemerataan akses pendidikan dan memberikan bantuan finansial kepada masyarakat yang kurang mampu agar dapat mengakses pendidikan yang berkualitas. Dengan demikian, diharapkan masalah kemiskinan dan rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia dapat diminimalisir dan pembangunan nasional dapat berjalan lebih baik.

Tingkat pendidikan masyarakat sangat dipengaruhi oleh faktor kemiskinan. Dampak kemiskinan masih dirasakan oleh banyak orang, termasuk anak-anak, meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya, seperti bantuan keuangan desa, bantuan keuangan BOS untuk anak usia sekolah, dan bantuan Raskin untuk masyarakat. Keluarga dengan pendapatan rendah sering kali kesulitan memenuhi kebutuhan dasar anak-anaknya. Kehidupan anak-anak ini terdampak oleh kemiskinan orang tuanya, hingga hak-haknya dilanggar. Karena alasan keuangan, anak-anak yang seharusnya memiliki masa kecil yang bahagia dan pendidikan terpaksa berkompromi.

Mereka terpaksa putus sekolah agar bisa bekerja demi memenuhi kebutuhan keuangan keluarga. Faktanya, karena menghambat aktivitas bermain dan pendidikan, hal ini dapat membahayakan kesehatan dan perkembangan mereka. Selain itu, kemiskinan mempunyai dampak lain. Pertama, karena masyarakat miskin sering kali menggunakan segala cara untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, maka terjadi peningkatan kejahatan di wilayah tersebut. Kedua, angka kematian meningkat karena sulitnya mendapatkan akses kesehatan yang memadai. Ketiga, akses pendidikan tertutup karena masyarakat miskin tidak mampu membayar pendidikan yang memadai. Keempat, meningkatnya angka pengangguran karena kesulitan mendapatkan akses pendidikan yang layak. Kelima, munculnya konflik antar masyarakat karena adanya kesenjangan yang memicu kecemburuan di masyarakat. Pemahaman yang mendalam mengenai dampak kemiskinan sangat penting dalam merumuskan kebijakan yang efektif untuk mengatasi kemiskinan dan mendorong pemerataan pembangunan yang berkelanjutan.

Yang menjadi kebijakan alternatif adalah Kebijakan penanggulangan kemiskinan di Indonesia mengadopsi dua pendekatan utama, yakni kebijaksanaan tidak langsung dan kebijaksanaan langsung. Pendekatan tidak langsung difokuskan pada penciptaan kondisi yang mendukung upaya penanggulangan kemiskinan, seperti stabilitas sosial politik, keberlanjutan ekonomi, dan pembangunan budaya yang inklusif. Ini termasuk upaya pengaturan ekonomi makro melalui kebijakan keuangan dan perpajakan yang hati-hati, serta pengendalian tingkat inflasi untuk memastikan harga kebutuhan dasar tetap terjangkau bagi penduduk miskin. Pendekatan



langsung dalam penanggulangan kemiskinan menekankan peningkatan partisipasi serta produktivitas sumber daya manusia, khususnya di kalangan masyarakat dengan pendapatan rendah. Upaya ini melibatkan penyediaan kebutuhan esensial seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pelayanan kesehatan, dan akses pendidikan. Selain itu, pendekatan ini juga melibatkan pembangunan program-program sosial ekonomi yang berkelanjutan, bertujuan untuk meningkatkan kemandirian kelompok masyarakat yang rentan terhadap kemiskinan.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan penanggulangan kemiskinan sebagai fokus utama dalam agenda pembangunan nasional, yang tercermin dalam dokumen perencanaan tahunan seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Untuk mengurangi kemiskinan, pemerintah meluncurkan sejumlah program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dijalankan oleh Kementerian Sosial. Program-program ini bertujuan memberikan bantuan kepada keluarga miskin guna memenuhi kebutuhan dasar mereka. Evaluasi terus dilakukan terhadap efektivitas program-program tersebut, dengan beberapa skema bantuan seperti Raskin dan Bansos penanganan kemiskinan ekstrem masih dinilai belum optimal. Selain itu, untuk mengentaskan kemiskinan secara menyeluruh, diperlukan langkah-langkah strategis seperti perluasan akses keuangan, perbaikan fokus pada kemiskinan dalam perencanaan nasional, pengembangan sistem jaminan sosial komprehensif, investasi dalam kesehatan dan sanitasi, serta penguatan peraturan ketenagakerjaan yang lebih fleksibel.

Rekomendasi Kebijakan

Kebijakan Pemerintah yang direkomendasikan adalah Penanggulangan kemiskinan berbasis pendidikan berfokus pada peningkatan kualitas dan rata-rata lama sekolah (SDM) untuk memutus rantai kemiskinan. Para ahli menekankan pentingnya akses pendidikan dasar, pelatihan keahlian (vokasi), dan bantuan sosial pendidikan agar individu produktif dan mampu bersaing di pasar kerja.

Rekomendasi Kebijakan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

1. Tingkat Dasar (SD-SMP): Fokus pada pemenuhan wajib belajar, perbaikan sarana sekolah, dan keringanan biaya pendidikan (buku/transportasi) bagi keluarga kurang mampu untuk mencegah putus sekolah.
2. Tingkat Menengah (SMA/SMK): Penekanan pada pendidikan vokasi yang link-and-match dengan industri untuk meningkatkan keahlian teknis agar langsung terserap lapangan kerja.
3. Tingkat Pendidikan Tinggi/Lanjutan: Penyediaan beasiswa khusus (seperti Bidikmisi/KIP Kuliah) untuk meningkatkan akses pendidikan tinggi bagi masyarakat miskin guna memutus rantai kemiskinan antar generasi.
4. Kebijakan Pendukung (Umum):
 - a. Pemberdayaan Masyarakat: Pelatihan keterampilan bagi masyarakat dewasa yang kurang berpendidikan (non-formal).
 - b. Perlindungan Sosial: Integrasi bantuan sosial (seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Indonesia Pintar (PIP)) dengan kepatuhan pendidikan.

Peningkatan rata-rata lama sekolah secara signifikan akan meningkatkan produktivitas dan



pendapatan, yang pada akhirnya menurunkan jumlah penduduk miskin.

KESIMPULAN

Tingkat pendidikan masyarakat sangat dipengaruhi oleh faktor kemiskinan. Pendekatan berkelanjutan dalam penanggulangan kemiskinan sangat penting, mengingat kemiskinan akan selalu menjadi masalah yang harus diatasi. Melalui pendidikan yang berkelanjutan, diharapkan upaya penanggulangan kemiskinan dapat mencapai hasil yang signifikan, karena pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang tidak hanya memberikan manfaat saat ini tetapi juga di masa depan. Kebijakan Pemerintah yang direkomendasikan adalah Penanggulangan kemiskinan berbasis pendidikan berfokus pada peningkatan kualitas dan rata-rata lama sekolah (SDM) untuk memutus rantai kemiskinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad, K. A., 2021, "Peran Pendidikan Kewirausahaan Untuk Mengatasi Kemiskinan. Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora, 2(6), 173–181.
- Ali Hardana 2023, "Hubungan antara kemiskinan dan pendidikan di Indonesia dengan pertumbuhan ekonomi" (Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik, 2(1), 7-19).
- Asnawi, Kindangen, & Engka, 2021, "Pengaruh Pendidikan, Program Keluarga Harapan dan Program Rumah Tinggal Layak Huni Terhadap Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Minahasa Tenggara", <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jpekd/issue/view/Mei%202020>
- Hindun, Soejoto, dan Hariyati, 2019, "Pengaruh Pendidikan, Pengangguran, dan Kemiskinan terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia", Digital Library Unesa.
- Nasution & Marliyah, 2023, Penelitian kualitatif deskriptif di Kec. Pulau Rakyat, Asahan, menyoroti efektivitas program pemerintah (PKH, BPNT, KUBE, UMKM) dalam mengatasi kemiskinan dan pengangguran stiealwashliyahsibolga.ac.id.
- Papilaya, J, 2020, "Kebijakan Publik Dalam Pengentasan Kemiskinan (Suatu Kajian Peranan Pemerintah Dalam Pengentasan, yang diterbitkan di *Jurnal Bimbingan dan Konseling Terapan*, 4(1), 77-91.
- Purnomo, Istiqomah, & Suharno, 2020, "Hubungan Pendidikan dan Kemiskinan: Pendekatan Variabel Mediasi Pendapatan per Kapita", Volume 09 No. 06 Tahun 2020, E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana.